



ISSN: 1858-2664

Maret 2008, Vol. 4 No.1

## KONSEP

### PEMBERDAYAAN PETANI: PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Dwi Sadono

#### Pendahuluan

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian adalah menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor non migas. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Kontribusi penting penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pangan telah menyebabkan cepatnya perkembangan minat orang dalam penyuluhan selama beberapa dekade terakhir (van den Ban dan Hawkins, 1988). Beberapa negara telah berhasil memajukan pertaniannya yang memungkinkan kebutuhan pangan penduduknya terpenuhi dan pendapatan petani meningkat.

Perhatian terhadap masalah pertanian, khususnya pangan, telah lama mendapat perhatian para ahli. Perhatian tersebut tampak sangat menonjol ketika muncul karya R. T. Malthus pada akhir abad ke 18 (Rusli, 1989). Malthus melihat pangan sebagai pekekang hakiki dari perkembangan penduduk di samping pekekang-pekekang lainnya yang berbentuk pekekang segera. Menurutnya,

apabila tidak ada pekekang maka perkembangan penduduk akan berlangsung jauh lebih cepat daripada perkembangan produksi pangan (*subsisten*). Hal ini karena perkembangan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan pangan mengikuti deret hitung.

Desakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya yang terus berkembang telah menyadarkan berbagai negara berusaha untuk meningkatkan produksi pangannya. Oleh karena itu, teknologi pertanian yang lebih baik terus dikembangkan dan diintroduksikan kepada petani agar petani mau menerapkan teknologi tersebut dan produksi pangan meningkat. Kegiatan menyebarkan informasi/teknologi pertanian tersebut, dikenal dengan penyuluhan pertanian (*agricultural extension*). Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan di luar sekolah (nonformal) untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka tahu, mau, mampu, dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik dan memuaskan dan meningkat kesejahteraannya (Wiriatmadja, 1990).

Penyuluhan pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai sejak awal abad 20. Penyuluhan pertanian bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan penjajah maupun untuk memenuhi kebutuhan pribumi. Kebutuhan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan akan dapat dipenuhi seandainya teknologi-teknologi maju yang ditemukan

para ahli dapat dipraktekkan oleh para petani sebagai produsen primer. Dengan hasil yang cukup menggembirakan, usaha-usaha ini terus dikembangkan dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (*Landbouw Voorlichting Dients* atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian (BPLPP, 1978; Iskandar, 1969).

Setelah mencapai kemerdekaan, usaha penyuluhan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah. Berbagai sarana dan prasarana pertanian disediakan, jumlah penyuluh ditambah dan ditingkatkan kemampuannya, demikian juga segala kemudahan bagi petani, termasuk berbagai subsidi, dan sebagainya. Namun demikian, sejalan dengan perjalanan politik pemerintahan Indonesia, paradigma penyuluhan pertanian tidak terlepas dari perkembangan tersebut. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas perkembangan paradigma penyuluhan pertanian di Indonesia terutama pada masa “revolusi hijau” dan masa sesudahnya.

### **Masa Revolusi Hijau: Penyuluhan Pertanian sebagai Alat Produksi?**

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian – khususnya beras - untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang terus meningkat, pembangunan pertanian sejak tahun 1960-an mengintroduksikan berbagai program. Berbagai program telah dilaksanakan mulai dari Demonstrasi Massal Swasembada Beras (Demas SSB), Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Khusus (Insus), Supra Insus dan sebagainya. Melalui berbagai program tersebut, diintroduksikan berbagai teknologi pertanian modern (benih unggul, pupuk buatan, irigasi dan lain-lain) dan ditumbuhkan kesatuan petani untuk bercocok tanam secara baik dan bergabung dalam kelompok tani untuk mempermudah komunikasi antar petani dan pembinaannya (BPLPP, 1978; Tim Faperta IPB, 1992).

Upaya tersebut dipacu oleh kebutuhan nasional untuk meningkatkan produksi, yaitu padi agar dapat berswasembada beras. Kebutuhan peningkatan produksi padi ketika itu besar sekali. Peningkatan ini selain dipicu oleh pertumbuhan jumlah penduduk, juga disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan kebutuhan beras per kapita per tahun juga meningkat. Keadaan ini lebih mendesak lagi dengan berubahnya pola makanan pokok penduduk di berbagai daerah, yang asalnya bukan beras menjadi beras seiring dengan meningkatnya kesejahteraan mereka (Tjitropranoto, 2003).

Seiring dengan kondisi di atas, penyuluhan pertanian juga ikut berubah. Jika semula menekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusaha yang baik, berubah menjadi tekanan pada alih teknologi, yakni mengusahakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan produksinya, dan menekankan pada tercapainya target produksi padi, baik target nasional, daerah maupun lokal (Tjitropranoto, 2003). Program tersebut dikenal dengan “revolusi hijau” dan telah mampu menghantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Hal ini merupakan prestasi besar karena Indonesia dikenal sebagai pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1974 yang mencapai lebih dari satu juta ton (Rusli, 1989).

Namun demikian, pencapaian prestasi yang besar tersebut ternyata juga menimbulkan masalah lain. Roadhes *et al* seperti dikutip Pasandaran dan Adnyana (1995) menyatakan bahwa selain lebih berfokus pada peningkatan produksi, paradigma pembangunan pertanian yang dominan pada waktu itu menekankan pada pendekatan yang sangat sentralistik, dengan dukungan dana dari pusat yang bersumber dari negara donor, statis dan mekanis, masing-masing pihak berperan secara spesifik sehingga kurang luwes, pola komunikasi linear, bahkan cenderung bersifat instruksional dengan sistem target yang kaku. Chambers (1993) berpendapat bahwa

paradigma yang dominan digunakan lebih berbasis pada transfer teknologi, dan bukan pada orangnya maupun proses belajarnya.

Pendekatan yang tidak mengutamakan manusianya ini ternyata menghasilkan ketergantungan yang tinggi oleh daerah kepada pusat dan pusat kepada negara donor, terkotak-kotak antara subsektor dalam agribisnis dan tidak sinergis (Oka dan Adnyana, 1995). Mengacu pada pendapat Chambers (1993), dampak yang ditimbulkan dari paradigma konvensional tersebut adalah:

- a. Menurunkan kreativitas petani dan menumbuhkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah.
- b. Kreativitas dan kearifan lembaga-lembaga lokal tidak berkembang bahkan banyak yang hilang.
- c. Program pembangunan agribisnis menjadi tidak efisien dan efektif karena biaya birokrasi pemerintah yang relatif tinggi.
- d. Program pembangunan sentralistik tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga komoditi unggulan lokal terdesak pilihan dari atas atau pusat.

Kottak (1988) dan Uphoff (1988) dengan mempelajari berbagai proyek di berbagai negara, menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang tidak mengutamakan manusianya (sosio-ekonomi dan budayanya) telah menyebabkan kurang berfungsi atau matinya kelembagaan lokal, lemahnya kemandirian petani, serta keberlanjutan pembangunan pertanian bisa terancam atau mengalami kegagalan. Proyek Pengawetan Tembakau di Tanzania, misalnya, yang bermaksud memukimkan 15.000 petani untuk menanam tembakau. Proyek ini tidak peka secara budaya dan mencoba melakukan *overinovasi*. Bercocok tanam secara koperatif yang dicanangkan mungkin berhasil bagi petani yang sudah mapan, desa-desa berorientasi komunal dan berdasarkan pertalian keluarga. Tetapi kerjasama terbukti mengecewakan di permukiman yang dihuni oleh orang-orang baru, yang sebelumnya tidak mempunyai dasar saling percaya.

## **Pemberdayaan: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian**

Apakah pendekatan konvensional tersebut di atas sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat itu? Terdapat pandangan yang berbeda dalam hal ini. Sebagian ahli pembangunan pertanian menyatakan bahwa paradigma pembangunan pertanian di atas, relevan sesuai dengan kondisi petani dan pertaniannya saat itu di mana petaninya masih tradisional (belum merasa memerlukan informasi pertanian atau belum responsif terhadap inovasi) dan pertaniannya masih subsisten.

Mosher (1978) mengidentifikasi adanya tiga kategori wilayah pertanian yang berbeda tingkat kemajuannya. Perbedaan itu menyangkut prasarana fisik, produktivitas pertaniannya serta tingkat kemajuan petaninya. Ketiga wilayah itu adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah yang prasarananya relatif memadai (karena telah dibangun sejak jaman penjajahan), teknologi yang diterapkan sudah maju secara mantap, produktivitas tinggi, berorientasi pada pasar, dan (karenanya) para petaninya telah membutuhkan dan mencari secara aktif informasi pertanian. Kedua, wilayah yang prasarananya baru dibangun tetapi belum mantap, produktivitas sedang, belum berorientasi pasar, dan belum aktif mencari informasi pertanian. Ketiga, wilayah yang relatif belum memiliki prasarana pertanian, teknologi tradisional masih mendominasi, produktivitas rendah, petaninya masih tradisional dan pertaniannya masih bersifat subsisten, dan belum merasa memerlukan informasi pertanian.

Dengan adanya desakan keperluan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi beras secara nyata pada masa revolusi hijau, maka diperlukan usaha-usaha yang cepat untuk mencapainya. Dengan kondisi petani yang belum responsif terhadap inovasi pada saat itu, maka paradigma konvensional tersebut dinilai relevan pada saat itu.

Sebagian ahli lain menyatakan bahwa pendekatan tersebut tetap tidak sesuai karena tidak mengedepankan aspek manusia (petani) dan proses belajarnya. Tujuan penyuluhan adalah agar petani tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik dan memuaskan atau dengan kata lain menghasilkan petani yang mandiri hanya mungkin jika dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan manusianya dan proses belajarnya. Pendapat ini didukung oleh pandangan bahwa petani sebagai orang dewasa telah mempunyai konsep diri, pengalaman belajar dan kesiapan belajar (Apps, 1973) sehingga sisi manusianya dan proses belajarnya perlu dikedepankan. Perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada tataran global, nasional, dan lokal serta pada masyarakat dan pada diri petani juga telah menuntut perlu dilakukannya perubahan pendekatan penyuluhan dari paradigma lama ke paradigma yang baru.

Keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan ternyata telah mendorong meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas-komoditas pertanian tertentu, seperti hortikultura, produk peternakan, produk perikanan, dan produk perkebunan. Peningkatan ini tidak saja pada kuantitasnya, tetapi juga dalam kualitasnya. Di samping itu, seiring dengan perkembangan regional dan internasional, Indonesia telah dihadapkan pada era globalisasi ekonomi ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia, seperti AFTA/NAFTA, APEC dan WTO yang semakin mendesak dan semakin dekat (Baharsyah, 1997 dikutip Purnama dkk., 2004; Sumardjo, 1999) Hal ini berimplikasi pada penghapusan berbagai kemudahan yang selama ini telah menjadi implementasi dalam pembangunan pertanian, seperti subsidi, proteksi dan sejenisnya. Oleh karena itu, berbagai sumber pertumbuhan untuk meningkatkan daya saing pertanian perlu dikembangkan. Arah yang jelas dalam upaya menghadirkan sosok pertanian modern dan petani modern dalam rangka memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul dari dampak

lingkungan strategis adalah dengan meningkatkan daya saing sektor ini.

Setidaknya terdapat empat hal yang berkaitan dengan upaya-upaya tersebut (Baharsyah, 1997 dikutip Purnama dkk., 2004). Pertama, sumber-sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Kedua, sumber-sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan nilai tambah produk pertanian. Ketiga, sumber-sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan pemenuhan permintaan konsumen yang selalu berubah dan ingin lebih baik, seperti jenis komoditi baru dan produk baru. Keempat, sumber-sumber pertumbuhan yang berkaitan dengan kelembagaan, misalnya penciptaan iklim usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembinaan hubungan yang saling menguntungkan antar subsistem agribisnis yang ada. Dalam upaya mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut, tampak betapa pentingnya keterpaduan atau sinergisme antara kegiatan pembangunan biofisik di lapangan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (*community development* atau *empowerment*).

Mengutamakan manusia dalam program-program pembangunan bertujuan untuk menyesuaikan rancangan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat dari program-program tersebut. Uphoff (1988) dalam hal ini menyatakan bahwa manusia tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”, melainkan sebagai “pemanfaat yang diharapkan” yaitu mereka yang akan diuntungkan dengan adanya program-program tersebut. Oleh karena itu, harus lebih jelas “kepada siapa” peraih manfaatnya dan “bagaimana” program dilaksanakan harus lebih besar mencerminkan pendekatan “proses belajar”. Hal ini untuk mendapatkan partisipasi pemanfaat yang dimaksud yang sesungguhnya layak pada semua aspek operasi program/proyek.

Chambers (1993) menyebutkan bahwa pendekatan yang mendahulukan atau

memprioritaskan petani sebagai pendekatan *farmer first*. Adapun ciri-ciri pendekatan *farmer first* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utamanya adalah memberdayakan petani.
2. Petani difasilitasi oleh pihak luar dalam menganalisis kebutuhan dan prioritas.
3. Alih teknologi dari pihak luar ke petani melalui prinsip-prinsip, metode-metode dan seperangkat pilihan-pilihan.
4. Petani diberikan kesempatan untuk memilih materi yang dibutuhkannya.
5. Karakteristik perilaku petani dicirikan oleh pengaplikasian prinsip-prinsip, memilih dari seperangkat pilihan-pilihan dan mencoba serta menggunakan metode-metode.
6. Hasil utama yang ingin dicapai oleh pihak luar adalah petani mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi petani.
7. Karakteristik model penyuluhan yang utamanya yaitu dari petani ke petani.
8. Agen penyuluhan berperan sebagai fasilitator dan pencari serta memberikan pilihan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soedijanto (2003) menyatakan bahwa mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang manakala penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi. Menyuluh bukannya “mengubah cara bertani” melainkan “mengubah petani” melalui 6 dimensi belajar (*learning*) yaitu:

1. *Learning to know* (penguasaan konsep, komunikasi informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu).
2. *Learning to do* (penekanan pada *skill* tingkat rendah ke tingkat tinggi menuju ke arah kompetensi).
3. *Learning to live together* (menegal diri sendiri, menegal diri orang lain, menemukan tujuan bersama, bekerjasama dengan orang lain).
4. *Learning to be* (memecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, belajar untuk disiplin).
5. *Learning society* (mengembangkan diri secara utuh, terus menerus).
6. *Learning organization* (belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar mengajarkan kepada orang lain).

Slamet (2001) mengajukan sembilan ciri yang merupakan paradigma baru dalam penyuluhan. Menurutnya, paradigma baru yang dikembangkan bukan untuk mengubah prinsip-prinsip, tetapi diperlukan untuk lebih mampu merespon tantangan-tantangan baru yang muncul dari situasi baru. Paradigma baru tersebut mencakup:

1. Jasa informasi, di mana penyuluhan harus mampu menyiapkan, menyediakan, dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani (produksi, pengolahan, pemasaran, dan sebagainya). Informasi perlu dipersiapkan dan dikemas dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti para petani.
2. Lokalitas, di mana untuk memenuhi prinsip lokalitas ini Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) dan lembaga sejenisnya harus lebih difungsi-aktifkan, bahkan diperluas penyebarannya sampai ke daerah tingkat II dalam bentuk stasiun-stasiun percobaan dan penelitian. Penelitian yang dilakukan harus bertujuan memecahkan masalah atau kebutuhan petani setempat.
3. Berorientasi agribisnis, di mana prinsip-prinsip dan teknologi yang berkaitan dengan agribisnis harus lebih banyak dikembangkan dan dipelajari oleh para penyuluh. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga yang menangani pengolahan dan produk-produk olahan itu

sangat diperlukan oleh lembaga penyuluhan pertanian.

4. Pendekatan kelompok, di mana para penyuluh perlu dipersiapkan dengan baik untuk membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan kelompok agar kelompok tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis sehingga mampu melancarkan pembangunan masyarakat desa yang benar-benar berasal dari bawah (*bottom up*).
5. Fokus pada kepentingan petani, di mana penyuluh harus lebih mendekati diri pada petani dan mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkan dalam program-program penyuluhan melalui kerjasama dengan petani.
6. Pendekatan humanistik-egaliter, di mana para penyuluh perlu dibekali dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi sosial, psikologi sosial, dan stratifikasi sosial.
7. Profesionalisme, yaitu perlunya dilakukan penataan dan peningkatan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang menangani tenaga penyuluh.
8. Akuntabilitas, yaitu perlu diciptakan sistem evaluasi dan akuntabilitas yang dapat dioperasikan secara tepat dan akurat, setiap jenis kegiatan penyuluhan harus jelas dan terukur tujuannya, biaya penyuluhan harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan tersebut.
9. Memuaskan petani, di mana pendidikan, pelatihan dan keteladanan yang tepat dapat menghasilkan tenaga-tenaga penyuluh yang mampu menyuluh dengan sepenuh hati.

Tujuan utama dari pendekatan-pendekatan baru yang diuraikan di atas adalah memberdayakan petani sehingga menjadi petani yang mandiri, di mana penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator, pencari serta memberikan pilihan-pilihan kepada petani. Petani mampu mengambil keputusan dengan

pilihan yang terbaik baginya, sehingga mampu meraih peluang dan menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan falsafah penyuluhan yang dianut dalam penyuluhan pertanian, yaitu *to help people to help themselves through educational means to improve their level of living* (menolong orang agar orang tersebut dapat menolong dirinya sendiri melalui penyuluhan sebagai sarannya untuk meningkatkan derajat kehidupannya).

Dalam hal ini Kottak (1988) menunjukkan bukti bahwa perhatian terhadap kesesuaian sosiobudaya ternyata memberi hasil - dipandang dari segi ekonomi – antara lain, dalam hal tingkat imbalan ekonomi dua kali lebih besar daripada yang tidak peka secara sosial dan proyek-proyek yang tidak tepat guna. Rekayasa sosiobudaya dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar diinginkan secara sosial, tetapi juga efektif dari sudut biaya.

Wijandi (1996) mengartikan kemandirian adalah wiraswasta, yang berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Menurut Sumardjo (1999), kemandirian petani (*farmer autonomy*) adalah petani yang secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usahatannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang diyakininya paling tinggi manfaatnya, tetapi bukan berarti sikap menutup diri melainkan dengan rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada di dalamnya, dan motif-motif perilaku berasal dari seluruh kenyataan yang dihadapi dalam kehidupannya.

Salah satu pendekatan penyuluhan yang menekankan pada sumberdaya manusianya adalah Sekolah Lapangan (SL) atau *Farmer Field School* (FFS). Sekolah Lapangan mulai dikenal di Indonesia dalam rangka Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai pada tahun 1990 (Dilts, 1992). Sekarang istilah SL telah diterapkan untuk program pertanian yang lain, seperti SLUBA (Sekolah Lapangan Usahatani Berbasis Agribisnis) dan lainnya. Sekolah

Lapangan merupakan suatu bentuk kegiatan belajar mengajar yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya inti (petani-nelayan) beserta petugas pertanian sebagai mitra kerjanya dengan memanfaatkan lapangan (sawah atau yang lainnya) sebagai tempat belajar sekaligus bahan ajarnya.

Penyuluhan dengan mengutamakan pengalaman langsung di lapangan dalam SL ini berbeda dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan sebelumnya yang lebih banyak dilakukan melalui ceramah dan demonstrasi (Dilts, 1992). Van de Fliert (1993) mencatat fakta bahwa revolusi hijau dan SL-PHT sebagai dua model pembangunan pertanian yang kontras, baik dalam muatan teknologinya maupun dalam pendekatan penyuluhannya.

Ciri yang dikembangkan dalam proses berlatih-melatih dalam Sekolah Lapangan PHT (Dilts, 1992) adalah sebagai berikut:

1. Sarana belajar ciptaan sendiri (*Self-generated Materials*), di mana sarana belajar utama sawah dan ekologi lahan pertanian setempat yang bersifat dinamis. Sawah menjadi acuan, bahan pengajaran, dan tempat belajar.
2. Cara belajar lewat pengalaman (*Experiential Learning Cycle*, ELC). Metode ELC dilaksanakan melalui tahapan: (1) mendapat/menggali pengalaman (*experiencing*), (2) mempertukarkan, mendiskusikan, menilai dan menganalisis pengalaman (*processing*), (3) mengembangkan prinsip dan mengambil kesimpulan (*generalizing*), dan (4) menerapkannya (*applying*).
3. Peran pemandu, bukan “mengajar” tetapi mengajak peserta untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar dan proses interaksi yang dialogis.
4. Analisis dan pengambilan keputusan. Kegiatan yang paling nampak dan paling pokok dalam setiap sesi SL adalah kegiatan analisis agroekosistem, untuk menajamkan “mata” terhadap dinamika ekologi lokal untuk meningkatkan daya

analisis petani dan pengambilan keputusan yang benar.

5. Latihan semusim, di mana latihan dilakukan dengan mengikuti tahap perkembangan tanaman agar setiap prinsip PHT dapat diteliti secara langsung dan nyata.
6. Dinamika kelompok dan pengembangan wahana petani, di mana mereka dibekali teknik dan metoda untuk meningkatkan kekuatan organisasi petani melalui latihan kerjasama, pemecahan masalah dan kepemimpinan.
7. Perencanaan dari bawah, di mana pemilihan lokasi untuk belajar menggunakan kriteria agroekosistem yang sesuai dengan kebutuhan setempat dan pengalaman petani.
8. Kurikulum yang rinci dan terpadu (*integrated*), di mana kurikulum yang disusun telah diuji dan konsisten terhadap prinsip-prinsip PHT dan adanya kekompakan antara materi yang satu dengan yang lain secara utuh.

Azas-azas yang dilaksanakan dalam SL-UBA menurut BPLP (1993), adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan antara petani-nelayan dan petugas pemandu (pembimbing), yang berarti petugas dan penyuluh pertanian tidak menganggap petani-nelayan sebagai murid tetapi sebagai mitra kerjanya.
2. Pengalaman nyata, yang berarti petani-nelayan bersama-sama petugas pemandu melaksanakan proses belajar-mengajar (berlatih-melatih) pada situasi usahatani yang nyata.
3. Kebersamaan, yang berarti petani-nelayan menggunakan kelompok petani-nelayan sebagai kelas belajarnya, unit berproduksi, organisasi kegiatan bersama dan wadah kerjasama.
4. Partisipasi, yang berarti petani-nelayan akan terlibat secara kelompok dalam proses pengambilan keputusan sehingga

mereka merasa ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan hasil keputusan tersebut.

5. Keswadayaan, yang berarti berupaya memanfaatkan swadaya petani-nelayan secara optimal sebagai wirausahawan yang memiliki usahatani yang mandiri yang tidak dapat begitu saja ditinggalkan.
6. Kesenambungan, yang berarti adanya jaminan arus penyampaian teknologi secara berkesinambungan, utuh, langsung dan segera kepada petani-nelayan.
7. Manfaat, yang berarti materi diklat adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan petani-nelayan dan bermanfaat untuk memecahkan masalahnya sekarang.
8. Kesesuaian, yang berarti materi diklat harus dikemas dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga mudah dipelajari pada level petani-nelayan.
9. Lokalitas, yang berarti materi diklat bersifat spesifik lokalitas (*locally spesific*) yaitu sesuai dengan potensi wilayah, keadaan sosial, ekonomi, masyarakat, yang akan berbeda dari satu tempat ke tempat lain.
10. Keterpaduan, yang berarti adanya kekompakan antara materi yang satu dengan yang lain secara utuh (*integrated*).

Hasil penelitian Sadono (1999) menunjukkan bahwa melalui SL telah terjadi peningkatan keberdayaan petani. Indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah: peningkatan penggunaan pengetahuan dalam pengelolaan usahatani, peningkatan kegiatan petani antar kelompok dalam kegiatan diskusi dan Laboratorium Lapangan Petani (LLP) untuk pengujian teknologi atau varietas baru oleh petani, penemuan dan penyempurnaan teknik pengendalian hama (seperti: teknik "lumpurisasi" untuk hama tikus), serta tumbuhnya inisiatif pembiakan musuh alami agar lebih tersedia di sawah. Penelitian lain dari Barzman dan Desilles (2002) menemukan bahwa melalui SI petani mengalami pemberdayaan dalam hal: peningkatan pengetahuan bertani, peningkatan aktivitas secara berkelompok dalam kelompok tani

(melakukan eksperimen teknik/tanaman baru, pengamatan dan membandingkan hasil dengan petani lain), dan pemberdayaan wanita.

### **Penutup**

Penyuluhan pertanian mempunyai peran untuk membantu petani agar dapat menolong dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara baik dan memuaskan sehingga meningkat derajat kehidupannya. Dengan demikian nilai penting yang dianut dalam penyuluhan adalah pemberdayaan sehingga terbentuk kemandirian petani.

Pada era Orde Baru, pembangunan pertanian yang dikenal dengan revolusi hijau telah dimanfaatkan oleh kepentingan pemerintah untuk tujuan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang terus meningkat. Seiring dengan itu, penyuluhan pertanian juga ikut berubah. Jika semula penyuluhan ditekankan pada bimbingan kepada petani dalam berusahatani yang lebih baik, berubah menjadi tekanan pada alih teknologi yakni mengusahakan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan produksinya terutama padi. Akibatnya petani menjadi tergantung, tidak mandiri dan kelembagaan lokal banyak yang kurang berfungsi atau bahkan hilang.

Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma dari paradigma lama yang lebih menekankan pada alih teknologi ke paradigma baru yang mengutamakan pada sumberdaya manusianya, yang dikenal dengan pendekatan *farmer first*, atau "mengubah petani" dan bukan "mengubah cara bertani", yang memungkinkan terjadi pemberdayaan pada diri petani.



### Rujukan

- Apps, J.W. 1973. *Toward A Working Philosophy of Adult Education*. New York: Publication in Continuing Education. Syracuse University.
- Barzman, M. and S. Desilles. 2002. Diversifying Rice-based Systems and Empowering Farmers in Bangladesh Using the Farmer Field School Approach in N. Uphoff (Editor). 2002. *Agroecological Innovations: Increasing Food Productions with Participatory Development*. London: Earthscan Publishing Ltd.
- BPLPP. 1978. *Tujuh Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia 1908-1978*. Jakarta: BPLPP Departemen Pertanian.
- BPLP. 1993. *Agribisnis, Seri I*. Jakarta: BPLP Departemen Pertanian.
- Chambers, R. 1993. *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. London: Intermediate Technology Publications.
- Dilts, R. 1992. *Sekolah Lapangan: Suatu Upaya Pembaharuan Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian.
- Kottak, C.P. 1988. Bila Manusia yang Utama: Beberapa Hikmah Sosiologi dari Proyek-Proyek yang Telah Selesai dalam M.M. Cernea (eds). 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan* (Publikasi Bank Dunia). Penerjemah B.B. Teku. Jakarta: UI Press.
- Pasandaran, E. dan M.O. Adnyana. 1995. Peranan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam Meningkatkan Keterkaitan antara Peneliti dan Penyuluh. Makalah Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II, 5-6 Juli 1995. Bogor.
- Purnama, H., Sumardjo, D. Martianto, W.Q. Mugniesjah, E. Rustandi, Sudrajat, C.M. Kusharto, dan M. Ardiansyah. 2004. Analisis Pengembangan Usahatani Tanaman Pangan Terpadu Cianjur Selatan. Kerjasama Fakultas Pertanian IPB dengan Departemen Pertanian. Bogor.
- Rusli, S. 1989. Perkembangan Penduduk dan Masalah Swasembada Pangan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Sosek*, Nomor 3 Desember 1989. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Sadono, D. 1999. Tingkat Adopsi Inovasi Pengendalian Hama Terpadu oleh Petani, Kasus di Kabupaten Karawang Jawa Barat. Tesis. Program Pascasarjana PB. Bogor.
- Slamet, M. 1995. Pola, Strategi, dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II dalam I. Yustina dan A. Sudradjat (eds). 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan: Didedikasikan kepada Prof. Dr. H.R. Margono Slamet*. Bogor: IPB Press.
- Slamet, M. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah dalam I. Yustina dan A. Sudradjat (eds). 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan: Didedikasikan kepada Prof. Dr. H. R. Margono Slamet*. Bogor: IPB Press.
- Soedijanto. 2003. Penyuluhan Sebagai Pilar Akselerasi Pembangunan Pertanian di Indonesia pada Masa Mendatang dalam I. Yustina dan A. Sudradjat (eds). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan: Didedikasikan kepada Prof. Dr. H.R. Margono Slamet*. Bogor: IPB Press.
- Sumardjo. 1999. Kemandirian Sebagai Indikator Kesiapan Petani Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Sosek*, Volume 12 Nomor 1: April 1999. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Tim Faperta IPB. Tahun 1963 Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Masalah Pangan. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

- Tjitropranoto, P. 2003. Penyuluhan Pertanian: Masa Kini dan Masa Depan *dalam* I. Yustina dan A. Sudradjat (eds). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan: Didedikasikan kepada Prof. Dr. H.R. Margono Slamet*. Bogor: IPB Press.
- Uphoff, N. 1988. Menyesuaikan Proyek pada Manusia. *dalam* M.M. Cernea (eds). 1988. *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan* (Publikasi Bank Dunia). Penerjemah B.B. Teku. Jakarta: UI Press.
- Van de Fliert, E. 1993. Integrated Pest Management Farmer Field School Generate Sustainable Practices, A Case Study in Central Java Evaluating IPM Training. Ph.D. Thesis. Wageningen Agricultural University. The Netherlands.
- Wijandi, S. 1996. Pengantar Kewiraswastaan, Bagian I: Sikap Mental Wiraswasta. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bogor.